

POLICY BRIEF

**MEMUTUS RANTAI
KEKERASAN:**

**ANALISIS PENYEBAB
KEKERASAN & Penguatan
Pemberdayaan**

**PENYINTAS KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI
KOTA DENPASAR**

2024

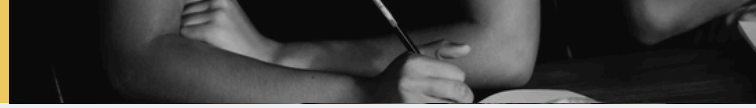
**OLEH :
NI LUH DWI SINTYASARI, S.Psi.**

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota
Denpasar

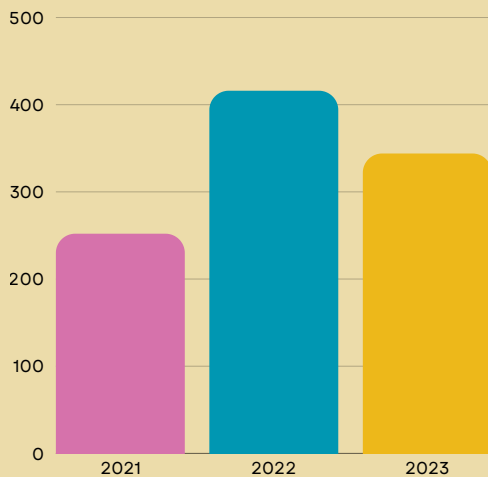
Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Berdasarkan hasil analisis data kekerasan terhadap perempuan dan anak UPTD PPA Kota Denpasar, terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan secara berulang. Faktor ini meliputi ekonomi (sebesar 30 persen), ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki (sebesar 25 perse) serta faktor pendidikan, lingkungan, serta psikologis. Hal ini menyebabkan perempuan dan anak berada di posisi rentan dan sulit memutus rantai kekerasan yang terjadi.

Kota Denpasar telah memiliki berbagai regulasi dan program kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Mulai dari Pelatihan *Public Speaking*, Pelatihan kewirausahaan, serta Program Pelatihan Keterampilan lainnya. Namun upaya pemberdayaan ini belum seratus persen menyentuh kelompok penyintas kekerasan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perolehan informasi serta pelatihan yang khusus serta ramah penyintas, belum terintegrasinya program pemberdayaan dengan informasi akses permodalan, pendampingan usaha, maupun pelatihan tenaga kerja bagi penyintas. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Denpasar perlu menguatkan kebijakan pemberdayaan ekonomi penyintas yang berorientasi pada kemandirian berkelanjutan guna meningkatkan nilai dan kepercayaan diri penyintas untuk lepas dari rantai kekerasan.

LATAR BELAKANG



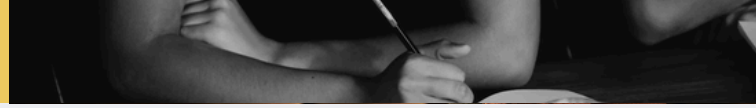
Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena yang bersifat multidimensional meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, budaya. Jumlah kasus yang dilaporkan umumnya adalah sebagian kecil dari angka kekerasan yang terjadi di masyarakat.



Sumber: Data Kasus UPTD PPA Kota Denpasar

Berdasarkan data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Denpasar, kasus kekerasan yang dilaporkan menunjukkan tren yang fluktuatif beberapa tahun terakhir. Tren fluktuatif ini terjadi baik pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun kekerasan non KDRT.

Penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan. Aspek ini meliputi pendidikan, kepribadian, lingkungan, ketergantungan ekonomi, dan budaya. Mengakarnya budaya patriarki serta ketimpangan gender menempatkan perempuan menjadi kelompok yang rentan menjadi korban (Komnas Perempuan, 2023). Penelitian Sulaeman dkk (2022) menemukan salah satu faktor terjadinya kekerasan adalah kemiskinan. Untuk itu, pemberdayaan bagi perempuan termasuk pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu upaya perlindungan dari kekerasan.



Di Kota Denpasar, upaya pemberdayaan perempuan telah dituangkan dalam berbagai regulasi, kebijakan, serta program kegiatan. Melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar pemberdayaan perempuan dilaksanakan dengan pelatihan dalam bidang hukum, sosial, dan budaya.

Program kegiatan ini menjangkau kelompok perempuan secara umum dan belum secara spesifik di rancang untuk memenuhi kebutuhan penyintas kekerasan yang memiliki karakteristik, kerentanan yang berbeda dan lebih kompleks.

Pemberdayaan bagi penyintas kekerasan bukan hanya memerlukan peningkatan keterampilan, namun juga dukungan yang lebih komprehensif termasuk akses terhadap permodalan, pendampingan usaha berkelanjutan, serta pemulihan psikososial. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Denpasar memerlukan strategi penguatan pemberdayaan penyintas dimulai dari kebijakan, sistem pelaksanaan layanan pemberdayaan yang sistematis dan terintegrasi berbasis kebutuhan penyintas kekerasan.



Berdasarkan data UPTD PPA Kota Denpasar, ketergantungan ekonomi menjadi faktor penyebab yang paling banyak ditemui pada kasus kekerasan yang dilaporkan dan tertangani di UPTD PPA. Ketergantungan ekonomi berkontribusi sebesar 30 persen, diikuti oleh faktor relasi kuasa dan patriarki sebesar 25 persen dan faktor lain seperti faktor pendidikan, kesadaran gender, lingkungan sosial serta kondisi psikologis pelaku. Faktor ini menjadi hal krusial yang menyulitkan korban untuk memutus rantai kekerasan yang dialami.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan melalui regulasi, kebijakan, serta program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Namun, program tersebut memiliki tantangan yaitu:

- **Program pemberdayaan masih menyasar kelompok perempuan secara umum, belum spesifik bagi penyintas kekerasan.**
- **Akses permodalan yang masih bersifat pasif**
- **Belum ada mekanisme pendampingan khusus bagi penyintas**
- **Penyintas menghadapi keterbatasan psikologis, informasi, dan kepercayaan diri untuk mengakses layanan pemberdayaan**

berdasarkan hal analisis di atas, permasalahan utama **bukan** terletak pada **ketiadaan program**, melainkan **belum optimalnya spesifikasi** dan **aksesibilitas program bagi** kelompok **penyintas** kekerasan.



Spesifikasi Program Pemberdayaan bagi Penyintas

- Menyusun skema khusus dalam program yang sudah ada, mulai dari teknis pelaksanaan program, kegiatan sosialisasi terkait informasi layanan program, hingga integrasi akses layanan.
- Pendekatan program berbasis kebutuhan penyintas



Pendekatan proaktif dalam akses program pemberdayaan

- Pendampingan langsung bagi penyintas dalam mengakses layanan (permodalan, penguatan psikologis, rehabilitasi)
- Fasilitasi akses tanpa harus mencari secara mandiri
- Penyampaian program/layanan pemberdayaan secara langsung kepada penyintas



Pendampingan usaha berkelanjutan

- Mentoring bisnis dan monitoring perkembangan usaha penyintas



Integrasi layanan antar sektoral

- Kolaborasi Pemerintah Kota Denpasar dalam pemberdayaan ekonomi meliputi Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, UPTD PPA Kota Denpasar dengan Dinas Koperasi & UMKM Kota Denpasar, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Perbankan, dan CSR
- Sinkronisasi program pemberdayaan dan perlindungan untuk dapat menjangkau pemberdayaan yang spesifik dan sesuai kebutuhan penyintas.



Penguatan dukungan sosial

- Pelibatan komunitas dan desa adat
- Pengurangan stigma terhadap penyintas

Upaya pemberdayaan perempuan di Kota Denpasar pada dasarnya telah tersedia dan berjalan dengan baik. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, diperlukan penguatan melalui spesifikasi program, integrasi layanan khusus serta peningkatan aksesibilitas bagi penyintas maupun korban.

Optimalisasi program kegiatan pemberdayaan yang sudah dimiliki Kota Denpasar, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, nilai diri, kepercayaan diri sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi dan memutus rantai kekerasan secara berkelanjutan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2023). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.

Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati. (2022). Faktor penyebab kekerasan pada perempuan. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311-2320. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. (2021). *Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota denpasar tahun 2021 (data tidak dipublikasikan)*

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. (2022). *Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota denpasar tahun 2022 (data tidak dipublikasikan)*

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. (2023). *Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota denpasar tahun 2023 (data tidak dipublikasikan)*

